

Langkah Antisipatif Membangun Kemandirian Pangan Lokal Masyarakat di Papua Barat selama Masa Pandemi Covid-19

Triman Tapi^{1*}, Mathius Tapi², Barba Nelfi Hebby Sopacua¹

¹Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

²Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Manokwari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari

*Corresponding author: triman_09@yahoo.com

Abstrak

Sejak pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, berbagai tindakan seperti pembatasan perjalanan masyarakat dan penguncian wilayah telah mempengaruhi produksi dan distribusi pangan, khususnya sumber pangan pokok masyarakat yakni beras. Pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong sekitar sebagai lahan berkebun sumber pangan lokal, dapat dilakukan masyarakat di Papua Barat guna memproduksi dan mengoptimalkan sumber daya setempat dalam menjaga pasokan pangan bagi masyarakat terutama saat terjadi guncangan terhadap ketersediaan pangan. Dengan studi kasus di Provinsi Papua Barat, tulisan ini membahas beberapa tindakan antisipatif membangun kemandirian masyarakat asli Papua dalam mengupayakan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19. Data sekunder dari tinjauan berbagai sumber, hasil penelitian sebelumnya dan sumber lain yang relevan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Langkah antisipatif membangun kemandirian pangan lokal masyarakat di Papua Barat diantaranya pemanfaatan lahan kosong, membangun jaringan komoditas lokal tingkat masyarakat, pengelolaan komoditas lokal berkelanjutan, diversifikasi pangan lokal dan penguatan pendampingan, serta menjadikan pekarangan sebagai peluang kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga. Langkah antisipatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat memiliki ketahanan pangan sendiri dan tidak hanya mengandalkan konsumsi beras. Terutama menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini akibat pandemi Covid-19.

Kata kunci: Ketahanan pangan, Lahan pekarangan, Pandemi covid-19, Pangan lokal

Abstract

Since the Covid-19 pandemic spread throughout the world, various measures such as restrictions on community travel and regional lockdowns have affected food production and distribution, especially the community's staple food source, namely rice. People in West Papua can use their yards and surrounding vacant land as gardening land for local food sources, to produce and optimize local resources in maintaining food supply for the community. Especially when there is a shock to food availability. With a case study in West Papua Province, this paper discusses several anticipatory actions to build the independence of indigenous Papuans in pursuing food security during the Covid-19 pandemic. Secondary data from a review of various sources, the results of previous studies, and other relevant sources were then analyzed qualitatively. Anticipatory steps to develop local food self-sufficiency in West Papua include the use of vacant land, building a community-level local commodity network, sustainable local commodity management, diversification of local food, and strengthening help, as well as making the yard a job opportunity and additional household income. This anticipatory step aims to increase the community's independence in having their own food security and not only relying on rice consumption. Especially in the face of ongoing uncertainty as a result of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Covid-19 pandemic, Food security, Local food, West Papua, Yard

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan manusia dan terkait dengan ketahanan pangan. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama sandaran pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk (Victor, 2015; Khairad, 2020). Berdasarkan data BPS, sektor pertanian selama pandemi tumbuh 1,75 %, meskipun sedikit melambat dibandingkan 2019. Bila sektor pertanian mengalami kontraksi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi sangat dalam, karena besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi. Tercatat selama triwulan II tahun 2020, subsektor pertanian turut andil berkontribusi terhadap PDB sebesar 81% dibanding triwulan II tahun 2019 (Muslim *et al.*, 2020).

Sejak pandemi covid-19 mewabah, telah banyak mengubah semua situasi dan aktivitas sosial masyarakat secara global termasuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pertanian. Berbagai tindakan dilakukan untuk tetap menjaga keselamatan kesehatan masyarakat seperti pengaturan jarak sosial, kebersihan tangan secara teratur, anjuran penggunaan masker, penutupan institusi pendidikan, pembatasan pergerakan internal, pelarangan acara publik dan penutupan perbatasan diterapkan. Namun beberapa dari tindakan ini telah berkontribusi pada berkurangnya kekuatan ekonomi, kekurangan tenaga kerja untuk produksi pertanian, dan kerugian besar di sektor pertanian (Ilesanmi *et al.*, 2021). Dampak langsung dapat terganggunya produksi dan pendistribusian logistik bahan pangan ke masyarakat serta terbatasnya stok bahan pangan (Workie *et al.*, 2020). Diperlukan upaya mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan-lahan mereka dengan menanam berbagai jenis pangan lokal. Tujuannya mengantisipasi krisis pangan yang mungkin terjadi akibat pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 menjadikan masyarakat orang asli Papua ikut pula terdampak. Pembatasan pergerakan masyarakat sebenarnya akan memberikan banyak waktu bagi mereka yang mendiami kawasan perdesaan (kampung) menggiatkan kegiatan berkebun. Sebagaimana diketahui masyarakat Papua telah banyak yang beralih mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok dibandingkan bahan makanan lokal, seperti ubi, singkong, keladi, maupun sagu (Rauf dan Lestari, 2009; Baransano *et al.*, 2019). Memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam bahan pangan lokal, secara tidak langsung telah membangun ketahanan diri untuk beradaptasi terhadap pandemi Covid-19, selain itu juga untuk resiliensi kejadian bencana di masa depan (Fawzi dan Husna, 2021).

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan arah kebijakan dan program prioritas strategis, salah satunya lewat program ketahanan pangan lokal. Program ini menggunakan anggaran dari dana respek dan telah dilakukan di tahun 2020, mencakup 1.742 kampung di Papua Barat dengan setiap kampung menerima 225 juta rupiah. Selama masa pandemi, anggaran sebesar 225 juta rupiah ini difokuskan untuk ketahanan pangan lokal melalui program padat karya, membuka kebun untuk tanam keladi, kasbi, betatas, jagung dan pangan lokal lainnya. Ajakan membudidayakan pangan lokal sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua dengan pendekatan kultural. Inpres ini menekankan strategi pembangunan berbasis budaya, wilayah adat dan fokus pada Orang Asli Papua khususnya yang berada di wilayah terisolir dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau.

Memperkirakan imbas pandemi COVID- 19 pada sektor pertanian di Provinsi Papua Barat, maka sepatutnya pemerintah daerah selain mengalokasikan dana untuk program ketahanan pangan lokal di tiap kampung, perlu diikuti upaya peningkatan kapasitas masyarakat sasaran dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya lahan yang tersedia dan sumber pangan lokal sebagai komoditas bernilai terutama di masa pandemi seperti saat ini. Oleh sebab itu, makalah ini bermaksud untuk mendeskripsikan berbagai langkah antisipatif membangun kemandirian masyarakat asli Papua dalam mengupayakan ketahanan pangan selama masa pandemi covid-19, dengan studi kasus di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder hasil *review* dari berbagai sumber dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta sumber lain yang dipandang relevan. Data selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

MEMBANGUN KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Pemanfaatan Lahan Kosong sebagai Sumber Bahan Pangan Sendiri

Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah sebesar 10,2 juta hektar, 90 % atau sekitar 9,2 juta hektar merupakan kawasan hutan. Sedangkan areal non-kawasan hutan bagi pemukiman hanya sekitar 10 persen dari total luas wilayah yang ada, ini menggambarkan bahwa Papua Barat memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk pengembangan sektor pertanian baik komoditas sayur-sayuran maupun komoditas perkebunan sebagai komoditas unggulan bernilai ekspor. Data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua Barat menyebutkan terdapat 11.545 hektar lahan pertanian yang dimiliki, hanya 7.174

hektar yang aktif ditanami padi atau tanaman lainnya. Ini berarti terdapat 4.371 hektar lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal (KabarPapua, 2020).

Kondisi lahan kosong yang belum digarap atau dibiarkan terlantar adalah hasil komprehensif dari berbagai faktor. Karena perbedaan geografi, lokasi, ekonomi, dan pengelolaan kampung di berbagai wilayah Papua Barat, memiliki efek spasial nonstasioner terhadap lahan kosong tersebut. Pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi lahan kosong/terlantar bervariasi di berbagai daerah, dan lebih jauh lagi, faktor utama berbeda di setiap daerah (Tao *et al.*, 2020). Perlu kajian mendalam guna mengetahui potensi lahan tersebut, serta jaminan regulasi dan keamanan penggunaan sumberdaya lahan, sebagai prasyarat untuk pengembangan pertanian (Rouw dan Atekan, 2015).

Pengelolaan lahan yang tepat sesuai dengan potensi lahan dapat menghasilkan tanaman yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pengolah lahan. Pemerintah daerah lewat dinas-dinas terkait perlu mengesampingkan ego sektoral dengan membangun sinergitas meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membangkitkan kesadaran serta memotivasi masyarakat khususnya masyarakat asli Papua dalam pemanfaatan lahan kosong/pekarangan sebagai sumber pangan dan pendapatan keluarga. Selain itu, penerapan beberapa teknik sederhana penanaman lahan pekarangan dan pemeliharaannya yang dapat diimplementasikan secara mudah oleh masyarakat. Menurut Khan dan Begum (2002), penguatan kegiatan pemanfaatan lahan terlantar potensial yang digunakan untuk menghasilkan produksi komoditas yang dirancang per tahun akan meningkatkan ketersediaan, konsumsi, serta penjualan untuk komoditas tersebut serta membantu untuk meningkatkan nutrisi masyarakat (Lestari dan Pulau 2015).

Pemerintah Provinsi Papua Barat hendaknya menginisiasi gerakan kemandirian pangan keluarga bagi tiap rumah tangga di Papua Barat. Salah satunya dengan mengadopsi konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). Tiap rumah tangga mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Setiap kampung dapat didorong mendayagunakan potensi lahan terlantar yang ada untuk ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi sumber daya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan menjaga kelestariannya melalui kebun bibit kampung menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan dan mendapatkan

nilai ekonomi pemanfaatan pekarangan diintegrasikan dengan unit pengolahan dan pemasaran produk (Mardianto dan Djauhari, 2015).

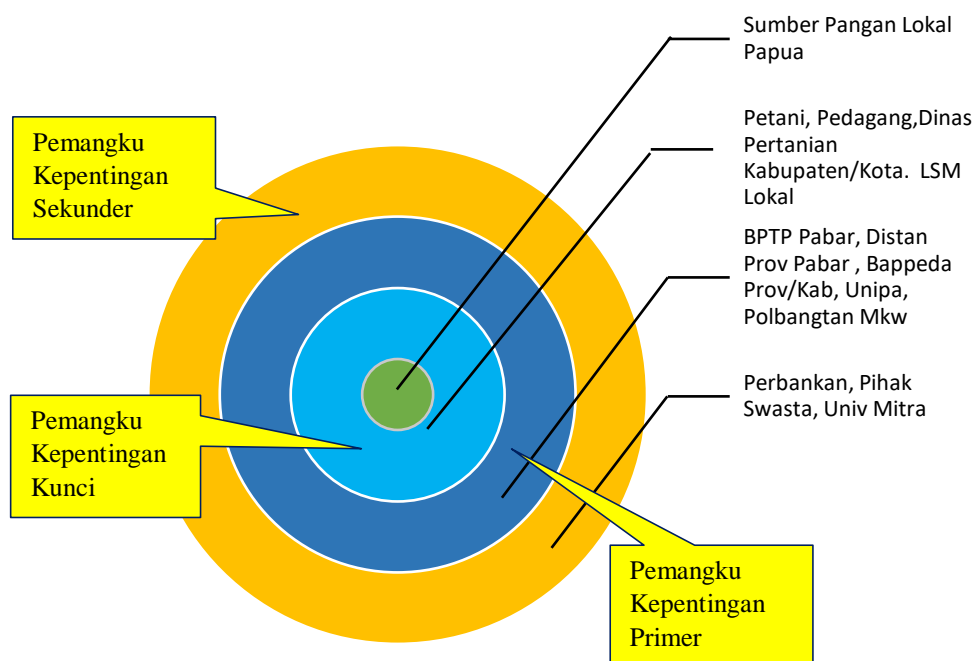
Membangun Jaringan Komoditas Lokal di Tingkat Masyarakat

Berbagai sumber pangan lokal Papua, baik yang telah dibudidayakan maupun yang tumbuh liar, telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan maupun pelengkap upacara adat. Tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian (petatas/ubi jalar, keladi/talas, kasbi/singkong), pisang, jagung, sagu, dan jawawut merupakan sumber pangan alternatif pengganti atau substitusi beras telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan secara turun-temurun. Pangan lokal ini dapat menjadi katup pengaman dalam menjaga pasokan pangan bagi masyarakat Papua di pedesaan pada saat terjadi guncangan (*shock*) terhadap ketersediaan pangan. Pada saat pasar tidak dapat melayani kebutuhan pangan masyarakat dengan baik akibat terhentinya akses fisik karena bencana atau terganggunya akses ekonomi karena lonjakan harga, pangan lokal yang ditanam petani di pekarangan, kebun, atau ladang selalu ada yang siap untuk dipanen.

Walaupun pemanfaatan sumber pangan lokal masih terbatas sebagai sumber pangan alternatif pengganti beras, namun diperlukan percepatan adopsi teknologi baik dari aspek budidaya, pasca panen sampai tahap pemasaran, sehingga produk pangan lokal dapat menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan di Papua Barat. Ketergantungan masyarakat lokal yang mulai beralih pada beras menimbulkan masalah baru bagi pemerintah daerah karena harus menyediakan dana untuk subsidi biaya transportasi ke wilayah-wilayah terpencil. Peran sektor swasta dalam pengadaan dan pendistribusian bahan pangan sangat kurang, karena selain biaya operasional tinggi juga daya beli masyarakat sangat rendah. Untuk menghindari masalah ini secara berlanjut, diperlukan upaya untuk mengembalikan pemanfaatan sumber pangan lokal (Rauf dan Lestari 2009). Ketersediaan pangan lokal sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat di Papua Barat akan terpenuhi bila bahan pangan lokal tersebut tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Sangat diperlukan membangun jaringan komoditas yang saling bersinergis antar pemangku kepentingan dalam menggerakkan pemanfaatan pangan lokal sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Jaringan komoditas sumber pangan lokal perlu terbentuk lewat hubungan kerjasama antar lembaga pendukung di daerah dalam memberikan nilai tambah produk pangan lokal dan keuntungan bagi setiap

pemangku kepentingan kunci, primer dan sekunder. Dengan kondisi ini percepatan keanekaragaman konsumsi pangan dapat tercipta dan ketahanan pangan masyarakat terutama sumber pangan lokal terealisasi.



Gambar 1. Jaringan Komoditas Pangan Lokal

Arah penguatan jaringan komoditas pangan lokal di Papua Barat dapat terlaksana apabila ada perlindungan produk pangan asli dan penciptaan kemandirian pangan melalui perbaikan kebijakan yang mendukung dan berpihak kepada masyarakat asli Papua. Selain itu, peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas, sertifikasi produk, penguatan kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perluasan pasar dan pelibatan multi pemangku kepentingan (ILO, 2015).

Pengelolaan Komoditas Lokal secara Berkelanjutan dengan Prinsip Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Masyarakat adat seperti ini telah menyatu dengan alam di sekitar mereka, karena nenek moyang mereka sejak dahulu hidup berinteraksi dan menyatu dengan alam terutama mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, sungai, laut) bagi kelangsungan hidup mereka. Jadi apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap alam, mereka sudah memahaminya. Olehnya itu, mereka berusaha untuk tetap menjaga kelestariannya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama lahan sekitar hutan untuk ditanami beberapa jenis pangan lokal dilakukan selain untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga juga sumber bahan pelengkap dalam setiap upacara adat. Pangan lokal bagi masyarakat adat merupakan bagian dari upacara adat mereka. Lahan sekitar hutan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mempertahankan kebutuhan untuk masa-masa yang akan datang. Pemanfaatan lahan sekitar hutan oleh masyarakat diatur sedemikian rupa dengan memegang teguh prinsip pelestarian sumberdaya dan memperhatikan kemampuan untuk penyediaan kebutuhan yang akan datang. Tahapan awal berkebun dengan menebang lokasi hutan adat setelah diukur lebih dulu. Setelah penebangan, dilakukan pembersihan lahan, kemudian sisa-sisa penebangan dibakar dan dijaga agar api tidak merambat. Baru kemudian dilakukan penanaman untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang demi memenuhi ketersediaan pangan keluarga dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Pada dasarnya suku-suku asli di Papua Barat mampu mengelola hutan adat dengan cara berkebun. Pengelolaan wilayah adat dan hutan adat dilakukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh nenek moyang mereka agar ekosistem alam dan hutan adat tetap terjaga demi masa depan anak cucu. Penggunaan alat-alat untuk kegiatan berkebun juga masih sangat sederhana, seperti tugal, parang dan kampak. Dalam pemanfaatan hutan kontrol sumberdaya lahan tetap dijalankan sesuai dengan aturan adat, sedangkan urusan kemasyarakatan mengacu kepada aturan kampung.

Tradisi berkebun dengan tanaman pangan lokal tetap harus dipertahankan masyarakat adat, terutama masa pandemi sekarang ini, gerakan mari berkebun dapat dijadikan momentum untuk kembali pada tradisi berkebun, karena pangan lokal cerminan identitas dan jati diri masyarakat Papua. Dengan demikian, masih ada harapan untuk mengembalikan pangan lokal sebagai pangan pokok bagi masyarakat Papua, sehingga ketergantungan pada bantuan pangan beras dapat dikurangi. Meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan lokal akan mendorong terciptanya usaha tani berbasis pangan lokal. Dari aspek sosial dan budaya, pengembangan tanaman pangan lokal sago, umbi-umbian, pisang dan jagung dapat dilakukan karena komoditas tersebut telah menyatu dengan masyarakat, baik sebagai bahan pangan maupun komoditas adat. Namun, pengembangannya memerlukan sentuhan inovasi teknologi guna meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Diversifikasi Komoditas dan Peran Pendampingan

Komoditas pangan lokal di Papua khususnya Papua Barat cukup beragam dan memiliki kandungan gizi cukup tinggi. Komoditas lokal, seperti sagu dan umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang harus dijaga dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Walaupun telah ada Perpres untuk percepatan diversifikasi pangan, namun implementasinya banyak kebijakan pangan yang justru paradox dengan kebijakan diversifikasi konsumsi pangan, seperti adanya kebijakan raskin, kebijakan produksi beras yang dominan dan mengabaikan produksi pangan lokal, dan lainnya (Ariani *et al.*, 2013). Pada prinsipnya, upaya diversifikasi pangan lokal dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melalui pemanfaatan bahan-bahan lokal yang sampai saat ini penggunaannya masih terbatas. Kedua, melalui pengembangan teknologi pengolahan untuk memperbaiki proses tradisional yang sudah ada.

Sebagai bahan pangan, umumnya komoditas lokal hanya diolah sekedarnya. Kurangnya sentuhan inovasi teknologi ini menjadikan produk pangan dari bahan baku lokal belum mampu berperan penting dalam ekonomi pangan nasional. Melalui pengembangan inovasi teknologi pengolahan pangan, berbagai komoditas lokal dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan yang lebih bervariasi, bergizi, dan menarik sehingga dapat memiliki nilai ekonomis dan bersaing di pasaran. Pada konteks ini masyarakat tak sekedar pengetahuan yang dituntut untuk diketahui, tetapi juga kemauan untuk mulai merubah pola konsumsi agar kita dapat membantu program ketahanan pangan Indonesia (Ekafitri dan Faradilla, 2011).

Upaya menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal akan efektif bila melibatkan semua pihak secara partisipatif dan kolaboratif antara masyarakat kampung, pemerintah kampung dan termasuk pendamping kampung. Ini dikarenakan peran pendamping memiliki multi fungsi dalam *community development* yaitu sebagai agen pembaharu (*agent of change*), *stakeholder*, pelaku, fasilitator, mediator, sumber informasi, konselor dan partner bagi masyarakat dan pemerintah kampung untuk mewujudkan pengembangan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian dalam ketahanan pangan keluarga.

Pendampingan terhadap masyarakat terutama dalam mendayagunakan lahan sekitar yang belum optimal digarap untuk selanjutnya dijadikan lahan berkebun komoditas pangan lokal, dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yakni (1) persiapan kegiatan secara bersama-sama masyarakat dilokasi sasaran kegiatan, berupa menginventaris lahan-

lahan belum terkelola dan memiliki potensi dijadikan lahan berkebun masyarakat, penyediaan input dan insentif; (2) sosialisasi mengenai gerakan berkebun komoditas lokal sebagai sumber ketahanan pangan keluarga dan menumbuhkan minat masyarakat mengoptimalkan lahan sekitar tempat tinggal untuk aktifitas berkebun tanaman pangan lokal dan sayur-sayuran; (3) pendampingan teknis budidaya komoditas pangan lokal yang tepat, melalui introduksi teknologi yang murah, ramah lingkungan, modal terjangkau dan mudah dipraktikkan oleh masyarakat; (4) evaluasi kegiatan secara periodik.

Pendamping terhadap masyarakat dalam pemanfaatan lahan sekitar sebagai tempat aktifitas berkebun tanaman pangan bukan menyangkut pelaksanaan dan hasil pemberdayaan, tetapi berperan secara aktif mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, melalui kegiatan sosialisasi program, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, kemitraan dan menciptakan kemandirian (Suswanto *et al.*, 2019).

Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Potensi Kesempatan Kerja dan Tambahan Pendapatan Rumah Tangga

Kegiatan berkebun dengan megusahakan pangan lokal berpotensi sebagai pencipta kesempatan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga, serta penggerak ekonomi daerah. Pemanfaatan lahan pekarangan atau kebun di sekitar rumah menciptakan kesempatan kerja bagi ibu rumah tangga, menyediakan tambahan bahan pangan sehingga mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pangan, dan bila dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai usaha berkelompok sehingga mencapai skala usaha dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi rumah tangga. Pada tahapan ini, penggunaan bibit unggul, teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan pangan diperlukan untuk menjamin efisiensi dan produktivitas serta kualitas produk. Hasil akhirnya, ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat lebih baik. Hasil kajian empiris mengungkapkan bahwa usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga.

Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan, secara teknis relatif mudah dilakukan. Sistem pertanian di lahan pekarangan memiliki kelebihan yaitu relatif mudah diawasi karena berlokasi dekat dengan pemilik. Disamping itu, bercocok tanam di pekarangan memiliki sejumlah keunggulan diantaranya: pemeliharannya dapat dilakukan setiap saat, mudah dijangkau, menghemat waktu, ekonomis, efisien dan efektif (Ashari *et*

al.,2016). Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dicari pola pertanian yang sesuai dengan kondisi pekarangan. Dalam hal ini pemilihan komoditas dan pola tanam maupun tata letak sangat penting. Menurut Penny dan Ginting (1984), usaha dari pemanfaatan lahan pekarangan memberikan sumbangan rata-rata 49% dari pendapatan rumah tangga (Suhartinia *et al.*, 2020). Kontribusi pekarangan terhadap pendapatan rumah tangga nilai besar kecilnya tergantung luas dan tingkat pemanfaatan, dan keanekaragaman tanaman yang ditanami.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pemanfaatan lahan pekarangan guna memenuhi kebutuhan pangan secara optimal harus memperhatikan karakteristik serta kekhasan yang melekat pada pekarangan tersebut. Perlunya sebuah penekanan bahwa hendaknya memposisikan petani bukan sebagai perorangan, melainkan sebagai anggota kelompok. Dengan berkelompok akan tumbuh kekuatan gerakan dengan prinsip keserasian dan keminipinan dari peserta program (Ashari *et al.*, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berakhirnya pandemi Covid-19 belum bisa diperkirakan secara akurat, banyak ahli ekonomi yang memperkirakan dampaknya terhadap perekonomian nasional dapat berlangsung cukup lama, tidak selesai dalam satu atau dua tahun ke depan. Berdasarkan perkiraan situasi ekonomi tersebut, pangan lokal memiliki potensi untuk turut mengatasi gangguan pada ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Mengantisipasi kondisi krisis pangan selama masa pandemi covid 19, pemerintah provinsi Papua Barat telah menginisiasi program Ketahanan Pangan Kampung melalui pemanfaatan lahan sekitar oleh masyarakat untuk dijadikan lahan kebun komoditas pangan lokal seperti keladi, kasbi, betatas, jagung dan pangan lokal lainnya. Melalui upaya menggiatkan kembali optimalisasi lahan sekitar sebagai sumber pemenuhan pangan lokal akan mendorong masyarakat untuk tetap produktif mengolah lahan garapan dengan memproduksi pangan sendiri di tengah pandemi dan secara tidak langsung berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan atau ketahanan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.

Pemerintah Papua Barat harus segera merencanakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat asli Papua di sektor pertanian dengan menerapkan program dan reformasi manajemen risiko baru yang dibarengi dengan melindungi mata pencaharian masyarakat dengan program bantuan uang tunai atau suplai pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama darurat pandemi covid 19. Perlu pula langkah-langkah antisipatif munculnya kerawanan pangan di masyarakat dengan menghidupkan kembali gerakan mari

berkebun pada lahan-lahan marginal atau belum optimal dimanfaatkan masyarakat, agar diolah dan ditanami tanaman pangan lokal terlebih selama masa pembatasan pergerakan orang maupun penguncian wilayah. Kebijakan yang diambil pemerintah merupakan upaya mitigasi dan dapat membangun kemandirian masyarakat di tanah Papua dalam memanfaatkan kekayaan lingkungan, lahan yang tersedia, dan sumber pangan lokal sebagai komoditas bernilai. Masyarakat didorong agar memiliki ketahanan pangan sendiri dan tidak terjebak dalam kemiskinan akibat situasi yang tidak menentu saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. *et al.* (2013). *Kajian Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal*. 1–110.
- Ashari, NFN, Saptana, N. F. N. & Purwantini, T. B. (2016). 'Potensi Dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan', *Forum penelitian Agro Ekonomi* 30(1), 13.
- Baransano, R., Windia, I. W. & Suardi, I. D. P. O. (2019). 'Dampak Perubahan Pola Konsumsi Pangan Lokal Ubi Dan Sagu Menjadi Pangan Beras Di Kampung Makimi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua', *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 8(2), 262–71.
- Ekafitri, R., & Faradilla, R. H. F. (2011). 'Pemanfaatan Komoditas Lokal Sebagai Bahan Baku Pangan Darurat', *Jurnal Pangan*, 20(2), 153–61.
- Fawzi, N. I., & Vina N. H. (2021). 'Pemanfaatan Informasi Geospasial Untuk Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19'. *Seminar Nasional Geomatika*, 19: 1.
- Ilesanmi, F. F., Olayinka S. I, & Aanuoluwapo A. A. (2021). 'The Effects of the COVID-19 Pandemic on Food Losses in the Agricultural Value Chains in Africa: The Nigerian Case Study', *Public Health in Practice* 2(February), 100087.
- ILO. (2015). 'Laporan Studi: Kajian Ubi Jalar Dengan Pendekatan Rantai Nilai Dan Iklim Usaha Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua', *Kajian Rantai Nilai Ubi Jalar dan Iklim Investasi Jayawijaya*, 1–80.
- KabarPapua.co. (2020). '4.371 Hektar Lahan Pertanian Di Papua Barat Tak Difungsikan'. <https://kabarpapua.co/>. <https://kabarpapua.co/4-371-hektar-lahan-pertanian-di-papua-barat-tak-difungsikan/> (July 27, 2021).
- Khairad, F. (2020). 'Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis', *Journal Agriuma*, 2(2), 82–89.
- Lestari, P., & Pulau, D I. (2015). 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kawasan Rumah Pangan Lestari Di Pulau Sumatera'. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 18(1), 11–27.
- Mardianto, S., & Achmad D. (2015). 'Pendekatan Pembangunan Pertanian Berbasis Komoditas Vs Ekoregion: Upaya Mencari Jalan Tengah', *Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion*, 203–22.
- Muslim, C., Frans, B. M. D., & Dewa, K. S. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian *Dampak Pandemi*

Covid-19 Terhadap Kinerja Subsektor Tanaman Pangan.
<https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/03-BBRC-2020-II-1-2-CHM.pdf>
(July 24, 2021).

- Rauf, A. W., & Martina, S. L. (2009). 'Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Sebagai Sumber Pangan Alternatif Di Papua', *Jurnal Litbang Pertanian*, 28(2), 54–62.
- Rouw, Aser, & Atekan. (2015). 'Peranan Data Dan Informasi Pemetaan Aez (Agro Ecological Zone) Bagi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Kasus Wilayah Papua Barat'. *Buletin Agro-Infotek*, 1(1), 26–32.
- tinia, S. H., Sheila S., Mewa A., & Rinna S. (2020). 'Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Penyediaan Pangan Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19'. In *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi Dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*, 863–84.
<https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/42-BBRC-2020-V-3-2-SHT.pdf>.
- Suswanto, B., Rili W., Adhi I. S., & Sri W. (2019). 'Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan'. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40–60.
- Tao, Z. et al. (2020). 'Neglected Idle Rural Residential Land (IRRL) in Metropolitan Suburbs: Spatial Differentiation and Influencing Factors', *Journal of Rural Studies* 78(May), 163–75.
- Victor, U. I. (2015). 'The Empirical Analysis of Agricultural Exports and Economic Growth in Nigeria'. *Journal of Development and Agricultural Economics* 7(3), 113–22.
- Workie, E., Joby, M., Joan, N., & Sendhil, R. (2020). 'Deciphering the Impact of COVID-19 Pandemic on Food Security, Agriculture, and Livelihoods: A Review of the Evidence from Developing Countries'. *Current Research in Environmental Sustainability* 2: 100014. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2020.100014>.